

Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Penerapan *Good Governance* terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Nadira Hilmi Israr^{1*}, Efrizal Syofyan²

^{1,2} Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: nadirahilmiisrar@gmail.com

Abstract

The study aims to determine the effect of performance-based budgeting implementation and good governance implementation on the government performance accountability. The type of research used in this study is quantitative by using multiple linear regression with SPSS 25. The research result from regression analysis, performance-based budgeting implementation and good governance implementation had positive effect on the government performance accountability. In line with there was R² of 0,509 or 50,9%. It meant the contribution from performance-based budgeting implementation and good governance implementation reflected the government performance accountability of 49,1% while the rest of 49,1% was explained by other variables outside the research.

Keywords: *Good Governance Implementation; Government Performance Accountability; Performance-Based Budgeting Implementation.*

How to cite (APA 6th style)

Israr, N.H & Syofyan, Efrizal. (2022). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Penerapan *Good Governance* terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4 (4), 686-697.

PENDAHULUAN

Perjalanan otonomi daerah pasca era reformasi hingga sekarang telah membawa banyak perubahan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, menjadi babak baru terkait hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang dalam hal ini memberikan perubahan terkait pengelolaan keuangan daerah. Perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah telah memperbarui salah satunya akuntabilitas pemerintah daerah, yang semula akuntabilitas vertikal (kepada otoritas yang lebih tinggi yaitu pemerintah pusat) menjadi akuntabilitas horizontal (kepada publik secara luas yaitu masyarakat melalui DPR) (Muslim et al., 2017). Perubahan ini dapat dipahami sebagai tuntutan bagi organisasi sektor publik untuk lebih menekankan pada akuntabilitas horizontal. Pemerintah harus mampu mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam memberikan pelayanan prima kepada publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tuntutan yang muncul seperti penyampaian laporan keuangan eksternal, dapat merepresentasikan kinerja organisasi sektor publik dengan sebaik-baiknya.

Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi didukung dengan 2 (dua) indikator kinerja antara lain indikator nilai akuntabilitas kinerja dengan capaian BB dan persentase capaian sebesar 100%. Target predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Padang tahun 2017 yaitu BB, target tersebut dapat dicapai dengan nilai 70,46%. Tahun 2018 target predikat nya adalah BB dengan 73,28%. Kemudian tahun 2019 dengan capaian BB dan persentase capaian sebesar 74,32%. Penilaian dari tahun 2017-2019, meskipun target tidak tercapai akan tetapi tingkat efektivitas dan efisiensi pengguna anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja dan pengelolaan pemerintah daerah yang berorientasi pada hasil di Pemerintah kota Padang telah menunjukkan hasil yang baik (Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah kota Padang tahun 2017-2019).

Peran penyusun kinerja instansi pemerintah sangat penting dalam menghasilkan kinerja instansi pemerintah yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban tersebut terpenuhi melalui penyusunan RKA-SKPD dengan membangun sistem penganggaran yang dapat menggabungkan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan yang memberikan keterkaitan antara pendanaan yang tersedia dengan hasil yang diharapkan, atau yang biasa disebut dengan anggaran berbasis kinerja (Muhammad, 2019). Berikut data anggaran dan realisasi anggaran pemerintah yang ada di kota Padang tahun 2017-2019:

Tabel 1
Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Padang (Dalam Rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Target (%)	Capaian (%)
2017	2.177.091.356.188,00	2,092,277,707,122.03	100	96,10
2018	2.360.791.801.476,00	2,160,375,621,454.61	100	91,51
2019	2.692.438.463.837,32	2,350,116,615,606.61	100	87,29

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Padang Tahun 2017-2019 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1 di atas bahwasanya capaian realisasi anggaran pendapatan pemerintah daerah kota Padang pada tahun 2017 sebagai anggaran tertinggi selama 3 (tiga) tahun terakhir yang diberikan oleh pemerintah yang kemudian mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Data yang diperoleh memberikan indikasi bahwa anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah kota Padang mengalami ketidakstabilan target anggaran dan realisasi pada tiap tahunnya.

Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dianggap berhasil jika realisasi anggaran digunakan sepenuhnya dan seluruh proses secara umum dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan akuntabilitas publik dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Tuntutan agar terwujudnya pemerintahan yang kredibel didukung oleh instansi pemerintah yang efisien, efektif dan akuntabel agar menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik (Endrayani et al., 2014). Dengan begitu akuntabilitas kinerja dapat dicapai dalam praktik nyata.

Setiap OPD di kota Padang memiliki program yang memiliki tujuan meningkatkan taraf hidup setiap masyarakat di beberapa daerah yang tingkat perekonomiannya masih rendah. OPD kota Padang senyatanya juga telah menyelenggarakan pemerintahan dengan prinsip *good governance* dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Namun, seiring dengan berjalannya pemerintahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kritis, masalah yang muncul pada pengelolaan dan penataan kinerja yang dialihdayakan ke masing-masing OPD tetap menjadi suatu hal yang sulit untuk dihindari. Hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah akuntabilitas kinerja instansi pada OPD di

kota Padang dapat dipengaruhi oleh penerapan anggaran berbasis kinerja dan penerapan *good governance*. Sehubungan dengan urgensi penelitian, peneliti merumuskan tujuan penelitian untuk menguji secara empiris Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Penerapan *Good governance* Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Konsep akuntabilitas dapat dijelaskan dan berakar pada dasar teori keagenan dengan menggunakan model *principal-agent*. Akuntabilitas dapat dipandang sebagai kewajiban dalam hal ini pemerintah daerah (agen) bertanggung jawab untuk menyediakan, mengungkapkan dan melaporkan segala kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepadamasyarakat yang diwakili oleh DPRD (prinsipal). Dalam hal ini, organisasi sektor publik, baik instansi maupun pemerintah daerah, sudah seharusnya mampu menjadi subjek dalam pemberian informasi untuk memenuhi hak-hak publik. Keterkaitan pelimpahan wewenang antara prinsipal dengan agen diketahui melalui pelacakan proses-proses anggaran. Hal ini mengindikasikan munculnya asimetri informasi antara masyarakat atau DPRD sebagai prinsipal dan pihak eksekutif (OPD) yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) dimana memerlukan prinsip akuntabilitas dan transparansi di dalamnya.

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Manusia diciptakan dengan berbagai macam karakteristik dan perilaku. Menentukan penyebab atau motif perilaku serta karakteristik seseorang merupakan tujuan dari teori atribusi sebagaimana yang telah dinyatakan oleh pencetus teori atribusi (Fritz Heider dalam Ferdiansyah, 2016). Teori atribusi mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri, apakah itu disebabkan oleh faktor *dispositional attributions* (internal) seperti sikap, karakter atau sifat dan faktor *situational attributions* (eksternal) seperti tekanan situasi tertentu atau keadaan yang dapat mempengaruhi perilaku seperti kondisi masyarakat, nilai sosial, dan opini masyarakat (Luthans, 2005 dalam Ferdiansyah, 2016). Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) saat ini menjadi prioritas utama untuk menjaga citra pemerintahan yang dinilai masih sangat rendah (Efendi, 2021). Dengan adanya tingkat penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, maka teori atribusi dapat digunakan sebagai landasan untuk mengetahui sejauh mana faktor-faktor eksternal tersebut mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi di pemerintah daerah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi yang bertanggung jawab mengelola dan mengendalikan sumber daya serta melaksanakan kebijakan yang diamanahkan kepada mereka dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan melalui media pertanggungjawaban secara berkala (Suriani, 2015). Siklus akuntabilitas kinerja pemerintah dimulai dari penyusunan rencana strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Sebagaimana diarahkan dalam pedoman penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala LAN, pelaksanaan AKIP harus didasarkan pada beberapa prinsip antara lain komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf dari instansi terkait; berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh; memiliki sikap jujur, objektif, transparan, dan akurat sekaligus menyajikan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Anggaran Berbasis Kinerja

Willoughby (2011) dalam Hijal-Moghrabi (2017) mendefinisikan anggaran berbasis kinerja sebagai mendefinisikan anggaran berbasis kinerja sebagai sebuah proses untuk mengembangkan pengukuran kinerja operasi, layanan dan program pemerintah ke dalam proses anggaran, yang dimaksudkan untuk menggerakkan keterkaitan antara anggaran (input) dengan keluaran (output) dan hasil (outcome) yang diharapkan dari kegiatan, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil.

Robinson (2009) dalam Nanda (2016) anggaran berbasis kinerja memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja publik dengan menghubungkan pendanaan organisasi sektor publik dengan hasil yang akan dicapai melalui informasi kinerja yang sistematis. Penerapan anggaran berbasis kinerja dibentuk melalui tahapan siklus anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu, dimulai dari perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja.

Good Governance

Good governance merupakan konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama (Pratama et al., 2021). *Good governance* dalam implikasinya membutuhkan komitmen besar dari seluruh pelosok tanah air untuk menjaga solidaritas dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan melibatkan tiga pilar bangsa yaitu aparatur pemerintah, swasta dan masyarakat (Indriana, 2019). Dalam penerapannya pada kinerja pegawai pemerintahan, dibutuhkan respon tinggi terhadap penerapan *good governance* ini agar pegawai dari setiap instansi dapat concern dengan berbagai hal yang terkait dengan sistem pemerintahan (Indriana, 2019). Hal ini disebabkan karena penyelenggaraan publik masih sangat dipengaruhi oleh subjektivitas. Penerapan *good governance* dalam suatu OPD dinilai baik apabila memenuhi prinsip-prinsip dasar *good governance*, di antaranya yakni partisipasi, transparansi, kepastian hukum, cepat dan tanggap, berorientasi pada kepentingan, keadilan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dan visi strategis.

Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hubungan antara penerapan anggaran berbasis kinerja dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dilihat dari penjelasan yang dikemukakan oleh Mardiasmo dimana menyatakan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban publik, yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kegiatan dapat diadakan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat dari pengeluaran dan hasil tersebut (Abdallah & Cyntia Carolina, 2018). Pelaksanaan kegiatan pemerintahan berpaut dengan anggaran yang telah ditetapkan, maka anggaran sudah seharusnya memiliki kualitas yang tinggi dan realistis. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efektif memungkinkan pelaksanaan anggaran dapat berjalan lebih baik sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja publik (Abdallah & Cyntia Carolina, 2018). Berdasarkan penjelasan di atas, maka diperoleh rumusan hipotesis:

H1: Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Padang.

Pengaruh Penerapan *Good governance* terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pemerintah sebagai sebuah entitas sekaligus pelaksana teknis dan kebijakan wajib menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang berlaku secara umum serta memiliki ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketaatan yang tinggi akan berdampak signifikan terhadap sejauh mana instansi pemerintah dimintai pertanggungjawaban atas kinerjanya. Zirman et al. (2010) menyatakan bahwa standar penyelenggaraan akuntansi pemerintah saat ini didukung oleh sejumlah peraturan lain dengan tujuan yang sama. Peraturan tersebut dilaksanakan oleh semua pihak dengan harapan dapat memitigasi berbagai bentuk kecurangan dan tantangan utama dalam pencapaian prestasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. LAKIP sebagai sarana pengendalian dan penilai kualitas kinerja untuk mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan *good governance*. Adanya kepentingan tersebut mengindikasikan terbentuknya hubungan antara penerapan *good governance* terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka diperoleh rumusan hipotesis:

H2: Penerapan *good governance* berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Padang.

METODE PENELITIAN

Metode perancangan penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan jenis data primer yang berasal dari penyebaran angket/kuesioner yang telah dirumuskan oleh peneliti secara langsung ke seluruh responden terpilih sesuai dengan kriteria yang menjadi sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kausal atau sebab akibat yang bertujuan melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Ahyan et al., 2020). Data yang dikumpulkan yaitu data primer tentang kaitan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Penerapan *Good Governance* yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner. Unit analisis atau kesatuan yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah organisasi yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Padang. Data populasi dari penelitian ini yaitu pejabat struktural pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kota Padang. Data ini didapatkan secara relevan dari Situs Resmi Kota Padang terdapat 205 pejabat struktural 41 OPD yang terdiri dari Inspektoral, Badan, Dinas, dan Kantor Kecamatan. Kemudian, sampel diperoleh sebanyak 155 responden yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif berdasarkan olahan data SPSS 25 yang meliputi:

Tabel 2
Deskriptif Statistik

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja	143	64	110	91,1	9,918
Penerapan <i>Good governance</i>	143	67	133	108,91	11,145
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	143	27	50	43,39	4,428
Valid N (listwise)	143				

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2021

Hasil uji statistic deksriptif di atas diketahui sampel berjumlah 143 responden. Variabel X1, X2 dan Y diukur menggunakan metode pengukuran skala *likert*. Hasil pengolahan tabel 2 dapat dilihat nilai *mean* variabel penerapan anggaran berbasis kinerja (X1) sebesar 91,10 dengan standar deviasi sebesar 9,918 serta nilai maksimum dan minimum masing-masing sebesar 64 dan 110. Kemudian nilai *mean* variabel penerapan *good governance* (X2) sebesar 108,91 dengan standar deviasi sebesar 11,145 serta nilai maksimum dan minimum masing-masing sebesar 67 dan 133. Kemudian variabel dependen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) nilai *mean* 43,39 dengan standar deviasi 4,428 serta nilai maksimum dan minimum masing-masing sebesar 27 dan 50. Hasil pengolahan ketiga variabel menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini beragam dan bervariasi dikarenakan standar deviasi yang dimiliki oleh semua variable lebih besar dari 0.

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil analisis regresi linier berganda berdasarkan olahan data SPSS 25 yang meliputi:

Tabel 3
Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients		
				Beta	t	Sig.
1	(Constant)	12,579	2,603		4,832	0,000
	Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja	0,235	0,048	0,525	4,890	0,000
	Penerapan <i>Good governance</i>	0,087	0,043	0,218	2,031	0,044

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2021

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda seperti yang disajikan pada Tabel 3, persamaan strukturalnya diperoleh sebagai berikut.

$$Y = 12,579 + 0,235X1 + 0,087X2 + e$$

Berdasarkan hasil regresi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan seperti di bawah ini:

- 1) Nilai a sebesar 12,579 merupakan Constanta atau keadaan saat variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah belum dipengaruhi oleh variabel lain yaitu variabel penerapan anggaran berbasis kinerja (X1) dan penerapan *good governance* (X2). Jika variabel independen tidak ada maka variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) tidak mengalami perubahan.
- 2) Nilai b1 (nilai koefisien regresi X1) sebesar 0,235 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel penerapan anggaran berbasis kinerja maka akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,235, dengan asumsi bahwa variabel lain konstan atau tetap.
- 3) Nilai b2 (nilai koefisien regresi X2) sebesar 0,087 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel penerapan *good governance* maka akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,087, dengan asumsi bahwa variabel lain konstan atau tetap.

Besaran pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent di lambangkan dengan Beta (β). Aziziah & Setiawina (2021) menjelaskan bahwa variabel yang paling dominan merupakan variabel yang berpengaruh signifikan dan nilai β yang semakin menjauhi 0 (nol). Jika melihat variabel independen yang memiliki pengaruh lebih besar atau yang

paling mempengaruhi variabel dependen, dilihat dari nilai *Unstandardized Beta* (β) dan nilai *P-Value* pada tabel *Coefficients^a* di atas, variabel yang paling dominan adalah variabel penerapan anggaran berbasis kinerja (X1). Variabel X1 memiliki *P-Value* $< \alpha$ dan β X1 sebesar 0,525 lebih menjauhi 0 (nol) dibandingkan dengan β X2. Jadi pilihan variabel yang paling besar atau dominan yang tepat adalah penerapan anggaran berbasis kinerja (X1). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan anggaran berbasis kinerja (X1) memiliki pengaruh paling besar terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) pada OPD di kota Padang.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai *adjusted R Square* sebagai berikut:

Tabel 4
Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,718 ^a	,516	,509	3,104

a. Predictors: (Constant), Penerapan *Good governance*, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2021

Berdasarkan Tabel 4 nilai *adjusted R Square* diketahui sebesar 0,509. Artinya 50,9% akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dipengaruhi oleh variabel independen yaitu penerapan anggaran berbasis kinerja (X1) dan penerapan *good governance* (X2), sementara sisanya sebesar 49,1% (100%-50,9%) dijelaskan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini atau disebut juga sebagai error (e). Dengan asumsi variabel lain tersebut berdasarkan variabel dari penelitian-penelitian sebelumnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Hasil uji t berdasarkan olahan data SPSS 25 yang meliputi:

Tabel 5
Uji Statistik t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1 (Constant)	12,579	2,603		4,832	,000
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja	,235	,048	0,525	4,890	,000
Penerapan <i>Good governance</i>	,087	0,43	,218	2,031	,044

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2021

Hasil perhitungan uji t pada Tabel menunjukkan Nilai t_{tabel} adalah $\alpha = 0,05$ dengan derajat bebas (db) = $n-k-1 = 143-2-1 = 140$ adalah 1,977. Hasil uji parsial (uji-t) dalam Tabel 4.19 di atas menunjukkan bahwa variabel Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (X1) berpengaruh dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y), yang dapat dilihat dari perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} , yakni $t_{hitung} 4,890 > t_{tabel} 1,977$ dan nilai Sig. adalah $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Penerapan *Good Governance* (X2) berpengaruh dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y), yang dapat dilihat dari perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} , yakni $t_{hitung} 2,031 > t_{tabel} 1,977$ dan nilai Sig. adalah $0,044 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Hasil uji f berdasarkan olahan data SPSS 25 yang meliputi:

Tabel 6
Uji Statistik F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1435,357	2	717,678	74,497	,000b
Residual	1348,713	140	9,634		
Total	2784,070	142			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

b. Predictors: (Constant), Penerapan *Good governance*, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2021

Berdasarkan uji Anova atau uji-F pada Tabel 6 di atas, nilai F_{hitung} sebesar 74,497 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,000. Nilai F_{tabel} dari 143 responden adalah 3,06, sehingga nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yakni $74,497 > 3,06$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga memberikan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara variabel Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (X1) dan Penerapan *Good Governance* (X2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Padang (Y).

Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hipotesis pertama penelitian ini adalah anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Padang. Berdasarkan hasil uji t pada penelitian ditemukan bahwa H1 diterima karena nilai $t_{hitung} 4,890 > t_{tabel} 1,977$ dan nilai Sig. $0,000 < 0,05$. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan anggaran berbasis kinerja (X1) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Artinya, adanya keterlibatan pimpinan serta pegawai pada organisasi perangkat daerah dalam penerapan anggaran berbasis kinerja yang efektif berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi OPD di kota Padang.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu memiliki pemahaman yang jelas akan pentingnya penerapan anggaran berbasis kinerja dengan tepat. Pendekatan anggaran

dengan basis kinerja berguna sebagai alat pertanggungjawaban untuk mengukur kinerja pemerintah baik dari segi kinerja maupun pencapaian keuangan. Berdasarkan temuan empiris, akuntabilitas kinerja di OPD di kota Padang dapat ditingkatkan dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja melalui tahapan siklus anggaran yang sejalan dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Penerapan anggaran berbasis kinerja yang dilakukan oleh setiap OPD di kota Padang juga dianggap telah terlaksana dengan baik karena banyak responden yang memberikan tanggapan sangat setuju dan setuju untuk setiap pernyataan yang diajukan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari et al., (2021) membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain itu, Rezeqiah (2017) memberikan hasil bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan sebesar 51,5% terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dan pengendalian sumber-sumber daya pada OPD kota Padang, maka semakin besar pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Penerapan *Good governance* terhadap Kinerja Keuangan

Hipotesis kedua penelitian ini adalah *good governance* berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Padang. Berdasarkan hasil uji t pada penelitian ditemukan bahwa H_2 diterima karena nilai t_{hitung} 2,031 > t_{tabel} 1,977 dan nilai Sig. 0,044 < 0,05. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel *good governance* (X2) terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dianggap dapat menjadi modal awal untuk peningkatan kinerja dan pemahaman lebih bagi instansi pemerintah akan pentingnya akuntabilitas kinerja sebagai wujud nyata yang disampaikan kepada publik untuk bahan penilaian.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Febriani (2016) yang menjelaskan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Rahman & Rachman (2021) dalam penelitiannya juga memperoleh hasil signifikan terhadap penerapan prinsip-prinsip yang melekat pada *good governance*. Maka dapat disimpulkan bahwa jika instansi pemerintah berpegang pada prinsip-prinsip yang melekat dalam praktik tata kelola yang baik, hal ini akan berdampak positif pada akuntabilitas kinerja instansi dan memudahkan instansi untuk mencapai akuntabilitas kinerja yang dimaksudkan.

SIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada organisasi perangkat daerah di kota Padang.
- 2) Penerapan *good governance* juga memiliki berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada organisasi perangkat daerah di kota Padang.

Keterbatasan

Penelitian ini tidak luput dari beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya, antara lain sebagai berikut:

- 1) Data diperoleh dari responden secara tertulis berupa kuesioner sehingga ada kemungkinan dapat mempengaruhi hasil penelitian. Hal ini disebabkan karena persepsi responden yang disampaikan belum tentu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sedangkan jika data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka dengan responden terpilih, persepsi yang disampaikan oleh responden mungkin akan lebih mendekati dengan keadaan yang sebenarnya.
- 2) Penelitian ini hanya fokus pada dua faktor dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan banyak faktor lain yang dapat diukur dalam penelitian ini, seperti pengendalian internal, komitmen organisasi dan faktor lainnya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Data yang diuji apabila diperoleh melalui wawancara mungkin dapat membantu dalam mengendalikan jawaban tiap responden. Persepsi responden yang disampaikan kemungkinan akan lebih mendekati keadaan yang sebenarnya.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti masalah yang sama, perlu mempertimbangkan variabel independen lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti pengendalian internal dan komitmen organisasi serta dapat mengambil sampel yang lebih luas.
- 3) Peneliti selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup populasi sampel seperti lingkup Provinsi Sumatera Barat atau berbagai Kota se-Indonesia supaya hasil penelitian bisa lebih mencerminkan kondisi yang ada dan dapat digeneralisasikan untuk situasi apapun.
- 4) Hasil pengukuran dari persamaan analisis regresi linier berganda penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa variabel bebas yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap variabel dependen adalah penerapan anggaran berbasis kinerja (X1). Hal ini berarti penerapan anggaran berbasis kinerja berperan paling dominan dalam mewujudkan pertanggungjawaban unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang dialokasikan, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pelaporan kinerja secara berkala. Karena berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap OPD di kota Padang, dapat membuktikan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja memiliki hasil lebih signifikan dan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang paling dominan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, Z., & Cyntia Carolina. (2018). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik pada Instansi Pemerintah : Studi Kasus Dinas Pekerjaan Umum Kota Sungai Penuh. *Jurnal Ekonomi Sakti (JES)*, 7(1), 34–40.
- Ahyar, H., Andriani, H., Sukmana, D. J., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi (ed.); Issue March). CV. Pustaka Ilmu Group.
- Aziziah, S. A., & Setiawina, N. D. (2021). Analisis Pengaruh Produksi, Harga Dan Nilai Tukar Terhadap Ekspor Biji Kakao Indonesia Ke Belanda. *Cerdika: Jurnal*, 1(April), 448–455. <http://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika/article/view/67>
- Efendi, R. (2021). *Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Penelitian Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan)*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Endrayani, K. S., Adiputra, I. M. P., Ari, N., & Darmawan, S. (2014). Pengaruh Penerapan

- Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja). *E-Journal SI Ak*, 2(1).
- Febriani. (2016). Pengaruh Good Governance, Kompensasi, Komitmen Organisasi, Motivasi, dan Lingkungan Kerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Bintan). *Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 1–26.
- Ferdiansyah, R. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Pemeriksaan Audit Pemerintah (Studi Empiris Pada BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 16(2), 109–121.
- Hijal-Moghrabi, I. (2017). The Current Practice of Performance-Based Budgeting in The Largest U.S. Cities: An Innovation Theory Perspective. *Public Performance and Management Review*, 40(4), 652–675. <https://doi.org/10.1080/15309576.2017.1313168>
- Indriana. (2019). Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(1), 139–155.
- Luthans, F. (2005). *Perilaku Organisasi (Terjemahan)* (Edisi 9). Andi.
- Muhammad, S. (2019). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Mahasiswa Stiesia*, 8(8), 22.
- Muslim, J., Djalil, A., & Maulana, R. (2017). Influence of the Implementation of the Performance-Based Budgeting on the Performance Accountability of the Regional Government Institutions (Study at the City Government of Banda Aceh). *Research Journal of Finance and Accounting*, 8(6), 25–33. <https://core.ac.uk/download/pdf/234631978.pdf>
- Nanda, R., & Darwanis. (2016). Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 1, No(1), 327–340.
- Pemerintah Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran RI Tahun 1999, No. 22. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Lembaran RI Tahun 2004, No. 33. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2015). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran RI Tahun 2015, No. 9. Jakarta.
- Pemerintah Kota Padang. (n.d.). *Laporan Kinerja Pemerintah Kota Padang Tahun 2017-2019*. Jakarta.
- Pratama, I. P. N., Luh, N., & Widhiyani, S. (2021). Open Access The Effect of the Effectiveness of Accounting Information Systems , Implementation of Good Governance , And Organizational Culture on Financial Performance. *Ajhssr*, 5(7), 84–92. <https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2021/07/K21578492.pdf>
- Rahman, K. G., & Rachman, S. H. (2021). *Pengaruh penerapan good governance dan pengendalian internal, terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa*. 2(1), 25–31. <https://doi.org/http://journal.ildikti9.id/Equilibrium>
- Rezeqiah, A. M. (2017). *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Robinson, M., & Duncan Last. (2009). *A Basic Model of Performance-Based Budgeting*.
- Sari, M. S., Suhendar, & Nofitri, R. (2021). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (studi pada Dinas perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan). *Jurnal of Accounting Taxing and Auditing*

(*JATA*), 3(1), 1–9.

Suriani, S. (2015). The Effect of Performance-Based Budgeting Implementation toward the Institution Performance Accountability (Case Study: Wajo). *Information Management and Business Review*, 16(4), 6–22.

Zirman, Edfan Darlis, & R. Muhammad Rozi. (2010). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Motivasi Kerja, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ekonomi*, 18(1999), 1–10.